



**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Iptek

Jumat, 29 November 2019



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2019**

Daftar Isi

1. MENDONGKRAK MUTU RISET (*Media Online Republika*)
2. DARI LURING KE DARING: SISTEM INFORMASI KOLABORASI DAN INFORMASI KINERJA (KRISNA) (*Media Online Bappenas*)

REPUBLIKA

SELASA, 3 DESEMBER 2019

Mendongkrak Mutu Riset

● ROSARI SALEH
Wakil Rektor III Bidang Riset dan Inovasi UI, Guru Besar FMIPA UI

Kemampuan suatu universitas melakukan riset adalah kebanggaan utama di sektor pendidikan tinggi. Riset adalah mahkota bagi peneliti. Kuantitas dan kualitas riset adalah mahkota utama bagi suatu universitas.

Kebanggaan itu akan kian lengkap dengan kepuasan jika riset tersebut menjadi solusi mujarab bagi masyarakat.

Universitas Indonesia (UI) tempat penulis puluhan tahun mengajar dan meneliti, menempatkan semangat menghadirkan solusi bagi masyarakat itu pada visinya, yaitu menjadi pusat ilmu, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing.

Tingginya posisi riset di perguruan tinggi inilah yang membuat penulis yang menjabat wakil rektor III bidang riset dan inovasi, pada 19 November lalu dan beberapa hari mendampingi telepon dan pesan singkat melalui berbagai platform.

Pertanyaannya beragam, tapi kalau disarikan mayoritas seperti ini, "Prof, selama ini peringkat riset UI selalu masuk tiga besar, bahkan sering kali ada di peringkat satu, kenapa sekarang merosot ke peringkat 12?"

Penulis mencari tahu apa yang membuat peringkat riset UI terjun bebas. Penulis cukup rutin memperbarui status riset yang dilakukan *civitas academica* UI. Baik melalui sistem internal maupun sistem yang Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (sebelumnya bernama Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi), yaitu *Science and Technology Index* (Sinta) di laman <<http://sinta.ristekdikti.go.id/>>.

Terakhir yang penulis ingat, UI masih di peringkat pertama, baik dari total nilai riset sepanjang yang dihitung sistem tersebut maupun total nilai untuk tiga tahun terakhir.

Rupanya, pada 19 November itu, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Ristek/BRIN) melakukan konferensi pers dengan Judul "Hasil Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2016-2018".

Penilaian kinerja berdasarkan data yang sudah dikumpulkan masing-masing perguruan

tinggi di Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Simlibtamas).

Penulis juga mengecek laman Sinta dan melihat UI masih di peringkat pertama untuk indeks penelitiannya. Penulis pun lega jadinya. Ternyata, UI ada di peringkat itu bukan karena hasil penelitiannya menurun atau jumlah penelitian merosot.

Itu karena para penelitiannya mungkin cukup banyak yang alpa mendaftarkan hasil penelitiannya di Simlibtamas. Penulis melakukan penataan ke dalam, terutama untuk memudahkan para peneliti UI mendaftarkan hasil risetnya ke Simlibtamas.

Penulis tak ingin pencapaian riset yang merupakan mahkota kebanggaan bagi suatu universitas tak tercapai hanya karena kealpaan dari sisi administratif.

Tanpa pretensi mengecilkan pencapaian kolega di berbagai universitas, rupanya kita kembali berdebat dalam pemeringkatan yang cenderung berubah-ubah standarnya.

Akhirnya, kalangan pendidikan tinggi di Indonesia tanpa sadar dikenakan oleh peringkatnya di indeks riset yang membaik hanya karena variabel indeks yang berbeda-beda.

Padahal, rumus dasar dalam membandingkan pencapaian suatu entitas dari tahun ke tahun adalah dengan standar yang sama. Jika ada beberapa jenis standar dengan variabel berbeda, hasilnya akan beragam.

Bagi *civitas academica* tidak menghekan jika suatu hal dinilai secara berbeda oleh standar berbeda. Itu sebabnya, di kampus perdebatan mengenai metodologi penelitian menjadi perhatian utama. Beda metodologi, umumnya hasilnya berbeda.

Dalam suatu standar penilaian, akan ada berbagai variabel yang diharapkan bisa mengukur pencapaian suatu entitas. Dalam konteks standar penilaian riset suatu universitas, beberapa variabel menjadi tolok ukurnya. Misalnya, jumlah riset yang dilakukan, jumlah riset yang dipublikasikan ke jurnal berstandar internasional, jumlah hak kekayaan intelektual yang dimiliki, jumlah buku yang diterbitkan dan variabel lainnya yang relevan.

Semua pemangku kepentingan sektor pendidikan tinggi sama-sama mafhum, kemampuan riset bukan hanya harus didorong, melainkan harus dilontarkan tinggi-tinggi.

Merujuk pada publikasi Simlibtamas itu saja gambaran besar sudah terlihat.

Hanya 47 perguruan tinggi dari 1.977 perguruan tinggi yang terdaftar dalam sistem tersebut yang masuk kategori mandiri. Hanya 2,4 persen perguruan tinggi yang mandiri dari segi riset. Angka ini mengkhawatirkan.

Dengan konteks itu, solusinya bukan berdebat soal standar mana yang diikuti apalagi menyandarkan rasa puas kita pada penilaian berdasarkan standar administratif, melainkan meningkatkan mutu peneliti dan memberi kemudahan berbagai penelitian.

Standar penilaian kemampuan riset lembaga pendidikan tinggi dalam negeri bukanlah tidak dibutuhkan, melainkan sangat penting. Standar penilaian ini sebaiknya disepakati mana yang akan digunakan bersama Kemenristek dan pihak pendidikan tinggi.

Ini terkait mana yang harusnya kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan kualitas suatu perguruan tinggi. Penyamaan persepsi atas tolok ukur sangat penting agar kita memiliki pengertian yang sama mengenai capaian yang harus diraih, kriteria, dan orientasinya.

Dengan posisi Indonesia pada fase mengejar ketertinggalan, sangat beralasan menggunakan standar yang diterima secara internasional dan sudah teruji menjadi alat analisis untuk memperbaiki kualitas riset.

Kalau sekarang, sudah ada kesadaran kita masih tertinggal, yang perlu dilakukan adalah meneliti dan memastikan kualitasnya sesuai standar internasional. Bukan membuat standar baru yang justru menjadi halangan tersendiri dalam penelitian.

Standar internasional kita adopsi saja, sambil berjalan diperbaiki sesuai kekhasan Indonesia. Langkah itu akan menghindarkan kalangan pendidikan tinggi dari kepuasan semu yang datang dari posisi yang tiba-tiba meroket karena standar berbeda.

Diakui atau tidak, kita sering dilanda kegalauan berkepanjangan hingga beribmas pada perubahan manajemen pendidikan dan riset. Namun, tidak terjadi perubahan signifikan dari sisi kualitas.

Salah satunya, karena kita cenderung merendam kekhawatiran bersaing secara internasional dengan standar yang terus diubah oleh kita sendiri. Mari kita meneliti untuk mengejar ketertinggalan! ■

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menggenjot kualitas riset pendidikan tinggi di Indonesia. Upaya meningkatkan riset tersebut dilakukan dalam sejumlah cara seperti tidak bergantung kepada anggaran pendanaan riset dari pemerintah yang hanya 0.08 persen dari GDP Indonesia. Kemudian pemerintah menggenjot kualitas riset terkait keinginan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Peningkatan tersebut agar pendidikan tinggi di Indonesia menuju kelas dunia atau World Class University.

Hashtag Berita :

#RevolusiIndustri #LembagaIlmuPengetahuan #APBN #Digitalisasi #LITBANG
#BadanRisetNasional #ProgramRisetNasional #BonusDemografi #KajianIlmiah #Akademisi
#BadanPengkajiandanPenerapanTeknologi

DARI LURING KE DARING: SISTEM INFORMASI KOLABORASI DAN INFORMASI KINERJA (KRISNA)

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

DARI LURING KE DARING: SISTEM INFORMASI KOLABORASI DAN INFORMASI KINERJA (KRISNA)



Adaptasi pemerintah Indonesia terhadap perkembangan revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan Internet of Things, cloud computing, dan machine learning atau Artificial Intelligent menghasilkan sistem pintar KRISNA.

Agustus 2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), dan Kementerian Dalam Negeri meluncurkan generasi terbaru dari Sistem Informasi Kolaborasi dan Informasi Kinerja atau yang disebut KRISNA 3.0. Sistem pintar yang namanya diambil dari tokoh pewayangan Kresna, sosok yang bijaksana, pintar, dan sangat piawai dalam menyelenggarakan

urusan tata kelola negara tersebut hadir sebagai inovasi efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan nasional. KRISNA berperan sentral dalam kerangka besar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan mewujudkan ekosistem pemerintahan digital di Indonesia. "Dengan digitalisasi pembangunan melalui KRISNA, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, sampai audit serta *feedback* perencanaan pembangunan, dilakukan secara integratif, *track&M*, transparan,

akuntabel dan papiris. Sistem KRISNA memudahkan *converge action* dalam pelaksanaan kegiatan secara cepat dan bahkan *real time* sehingga hasil evaluasi perencanaan pembangunan dapat lebih cepat diimplementasikan untuk perencanaan lebih berkualitas." kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharno Monarfa. Awalnya, KRISNA yang sudah hadir sejak 2017 hanya mempunyai satu sub-sistem, yakni KRISNA-RENJA yang berfungsi dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Di 2018, KRISNA 2.0 diluncurkan dengan penambahan tiga sub-sistem: (i) KRISNA-RKP—diperuntukkan guna membantu Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP); (ii) KRISNA-DAK—diluncurkan guna membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi pada proses perencanaan dan penganggaran atas kegiatan-kegiatan yang didanai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik serta (iii) KRISNA-SELARAS ditunjukkan untuk memudahkan Pemerintah Pusat dalam menyelaraskan usulan-usulan daerah dengan muatan RKP pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka penyusunan RKP. Selanjutnya, pada 29 Agustus 2019, KRISNA 3.0 diperkenalkan dengan menambahkan tiga sub-sistem lainnya. Pertama, KRISNA-RENSTRA—diperkenalkan guna membantu Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Kedua, KRISNA-Satuan Kerja—diluncurkan dengan tujuan mengkomodifikasi unit satuan kerja di



Kementerian/Lembaga dalam menyusun serta menyelaraskan rencana kerja unitnya dengan Renja K/L. Ketiga, KRISNA-Aspirasi—diberituk khusus bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat guna menyampaikan aspirasi mereka mengenai usulan DAK Fisik. Sebelum lahirnya KRISNA, proses perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara terpisah. Pada saat itu, proses perencanaan yang diseleenggarakan di Kementerian PPN/Bappenas masih berjalan secara luring (*offline*) sedangkan proses penganggaran yang diseleenggarakan di Kementerian Keuangan telah dilakukan secara daring (*online*). Akibatnya, munculnya perbedaan muatan, tata bahasa dan format pada data perencanaan dan penganggaran. Deviasi antara sasaran pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dalam Renja K/L dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) pun sering sekali tidak terhindarkan. Pasca KRISNA, data Renja K/L yang telah diinput dalam Sistem Informasi KRISNA akan diupload ke pada Sistem Informasi RKA-K/L sehingga Kementerian/Lembaga tidak perlu lagi melakukan input secara berulang. Hal tersebut mampu mengarsangi tingkat deviasi atas proses perencanaan dan penganggaran di Kementerian/

Lembaga. Tidak hanya itu, dengan adanya fitur tagging seperti, "Nawa Cita", "100 Janji Presiden", dan "Prioritas Nasional", keterkaitan antara program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan sasaran pembangunan yang telah disusun pada RKP dapat tergambar dengan baik. Pencapaian atas Renja K/L yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas kini tercatat secara sistematis. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan pun lebih efektif dilaksanakan karena adanya kevelelasan data perencanaan dan penganggaran serta hasil pelaksanaannya. Selain itu, perubahan cara kerja dan proses bisnis—yang semula dilaksanakan secara luring menjadi daring ini tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi, namun juga transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan nasional. Saat ini, KRISNA telah digunakan oleh 87 Kementerian/Lembaga, 34 pemerintah provinsi, 314 pemerintah kabupaten/kota serta seluruh unit perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. KRISNA juga telah menjadi integrasi dengan sistem informasi pemerintahan lainnya, yakni Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, e-Monev dari Kementerian PPN/Bappenas, Satu Anggaran, Online

Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan, Data Pokok Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. KRISNA diharapkan dapat terus berkembang dan berintegrasi dengan sistem-sistem pemerintah lainnya untuk mewujudkan mimpi besar pembangunan nasional yang dilakukannya secara holistik dan integratif baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

"KRISNA akan terus dikembangkan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik—terutama dalam kaitannya dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Dalam konteks implementasi e-Government, Bappenas akan terus membangun sinergi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri dan pihak terkait untuk terus merancang desain dan arsitektur pengembangan KRISNA sehingga dapat mewujudkan transformasi digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk pembangunan yang lebih baik," tukas Suharno.



www.bappenas.go.id

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), dan Kementerian Dalam Negeri meluncurkan generasi terbaru dari Sistem Informasi Kolaborasi dan Informasi Kinerja atau yang disebut KRISNA 3.0. Sistem pintar yang namanya diambil dari tokoh pewayangan Kresna, sosok yang bijaksana, pintar, dan sangat piawai dalam menyelenggarakan urusan tata kelola negara tersebut hadir sebagai inovasi efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan nasional. KRISNA berperan sentral dalam kerangka besar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan menciptakan ekosistem pemerintahan digital di Indonesia.

Hashtag Berita :

#KementerianPPN/Bappenas #Digitalisasi #KementerianPA&RB#RevolusiIndustri
#RencanaStrategisNasional #APBN #SistemKinerjaPegawai #RKP #ProgramRisetNasional
#KajianIlmiah #Akademisi #BadanLembagaPengkajiandanPenerapanTeknologi